

BAB III PEMBAHASAN

A. Konsep Dan Implementasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 Dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia

1. Konsep Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) adalah sistem yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia untuk menghitung dan menampilkan hasil pemungutan suara secara cepat dan transparan. Situng diperkenalkan pada pemilu serentak 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi penghitungan suara, serta memberikan akses informasi kepada publik mengenai hasil pemilu. Sebelumnya, penghitungan suara dilakukan secara manual, yang sering kali memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan.⁹²

Adapun tujuan utama dari adanya Situng yaitu:

- a. Meningkatkan Transparansi: Memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai hasil pemilu. Dengan adanya Situng, masyarakat dapat memantau hasil pemungutan suara secara langsung.
- b. Mempercepat Proses Penghitungan: Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghitung suara

⁹² Komisi Pemilihan Umum. *Berikan Gambaran Cara Kerja Situng ke Peserta Pemilu*. (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019).

secara manual. Situng memungkinkan hasil pemungutan suara dapat diakses dalam waktu yang lebih singkat.

- c. Meningkatkan Akurasi: Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penghitungan suara. Dengan sistem yang terintegrasi, data dapat diverifikasi dan dikoreksi dengan lebih mudah.⁹³

Dari berbagai jenis pemanfaatan teknologi dalam pemilu di Indonesia, teknologi dalam proses rekapitulasi suara menjadi 178 diskursus yang menuai banyak perdebatan dan perhatian publik. Hal ini dikarenakan proses rekapitulasi suara dianggap sebagai tahapan yang paling penting dari semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang ada karena sebagai dasar dalam menentukan kemenangan dan kekalahan calon. Ketidakpuasan warga negara terhadap hasil pemilu berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan instabilitas politik. Oleh karena itu, pemanfaatan Situng sebagai aplikasi berbasis online dalam tahapan rekapitulasi suara menuai kontroversi. Di satu sisi, Situng sebagai alat untuk membantu KPU dalam menjamin terciptanya transparansi dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan praktik kecurangan. Namun di sisi lain, kredibilitas Situng masih diperdebatkan oleh publik.⁹⁴

Proses rekapitulasi suara merupakan tahapan yang paling dinantikan oleh kandidat dan warga

⁹³ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG): Transparansi, Akurasi, dan Kecepatan dalam Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Maret 2019, hlm. 7–9.

⁹⁴ Pratama Rheza. "Analisis Situng...", hlm. 34-36.

negara sebagai penentuan kemenangan dan kekalahan calon. Pada umumnya, proses rekapitulasi suara memakan waktu yang cukup lama karena proses rekap dilakukan secara manual dan berjenjang sampai didapatkan hasil akhir perolehan suara secara keseluruhan. Dalam konteks pemilu nasional seperti pemilihan presiden, proses rekapitulasi suara memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemilu lainnya, sebab melibatkan seluruh jumlah pemilih di semua wilayah di Indonesia. Faktor perbedaan geografis yang cukup beragam semakin memperlambat proses rekapitulasi suara. Lamanya proses rekapitulasi suara kerap menimbulkan kecemasan dan kecurigaan publik. Selain itu, proses rekapitulasi yang berjenjang sering memberi celah bagi politisi untuk melakukan praktik kecurangan. Bentuk kecurangan pemilu saat rekapitulasi, misalnya melakukan manipulasi penghitungan dengan mengubah perolehan suara calon atau partai, terdapat kesalahan penghitungan baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga hasil tidak akurat dan hanya menguntungkan calon atau partai tertentu, atau penyelenggara pemilu tidak netral dan profesional dalam proses rekapitulasi suara.⁹⁵

KPU memperkenalkan Situng sebagai aplikasi berbasis online yang digunakan untuk membantu proses rekapitulasi suara secara *real time*. Dalam regulasi, Situng tidak diperuntukkan sebagai

⁹⁵ Hardiyanti, R. *et.al.* "Evaluasi Proses Rekapitulasi Suara dalam Pemilu Nasional Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 9(3), Juni 2022, hlm. 45-48.

alat yang sah untuk melegitimasi hasil pemilu. Hasil pemilu yang sah tetap mengacu pada proses rekapitulasi suara secara manual yang dilakukan oleh KPU. Meskipun demikian, Situng dapat memberikan berbagai keuntungan karena dapat meredakan kecemasan publik dan ketidakpastian dalam proses rekapitulasi yang memakan waktu lama. Melalui Situng, publik dapat ikut memantau proses rekapitulasi suara agar tidak terjadi kecurangan.⁹⁶

Sistem kerja Situng mengandalkan teknologi *scanner* dan jaringan internet untuk kepentingan publikasi. Hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dituangkan dalam dokumen resmi dalam bentuk Form C1. Terdapat dua jenis Form C1 di setiap TPS. Kedua jenis Form C1 ditandatangani oleh berbagai pihak terkait, yaitu penyelenggara pemilu di TPS, saksi partai atau kandidat, pengawas pemilu, dan pemantau pemilu di TPS masing-masing. Pertama, Form C1 berhologram dimasukkan di kotak suara untuk dilakukan penghitungan rekapitulasi suara secara berjenjang. Proses rekapitulasi suara berjenjang dengan basis Form C1 berhologram dinyatakan sebagai hasil perolehan suara sah berdasarkan regulasi pemilu yang berlaku. Kedua, Form C1 tanpa hologram yang diperuntukkan bagi saksi partai atau kandidat, pengawas dan pemantau pemilu sebagai bentuk transparansi. Form C1 tanpa hologram ini kemudian diserahkan dan dikumpulkan ke sekretariat Panitia Penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan (PPK). Selanjutnya, PPK

⁹⁶ Hasan, M. "Pengawasan Pemilu melalui SITUNG: Studi Kasus Pemilu 2019." *Jurnal Demokrasi dan Teknologi Pemilu*, 5(2), Mei 2020, hlm. 88-90.

menyerahkannya ke sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing daerah. Dari sini, proses pelaksanaan Situng dimulai. Lalu, operator dan pegawai di KPU Kabupaten/Kota melakukan *input* dan *scan* data Form C1 ke internet yang tampilannya dapat dilihat di halaman web milik KPU RI.⁹⁷

2. Implementasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019

Inovasi KPU dalam teknologi rekapitulasi suara mendapat apresiasi dari banyak pihak karena sebagai bentuk memperkuat transparansi dalam proses pemilu dan mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat memantau proses rekapitulasi suara melalui Form C1 yang diunggah di internet. Meskipun hasil rekapitulasi suara lewat Situng tidak dijadikan acuan untuk memenangkan pasangan calon, tetapi Situng dapat mengawal proses rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang untuk mencegah terjadinya kecurangan. Apabila hasil rekapitulasi suara secara manual dan online melalui Situng sangat berbeda tajam, maka dapat dipastikan ada kejanggalan yang mengarah pada tindakan malpraktik dan kecurangan dalam pemilu.

98

⁹⁷ KPU RI. *Mau Tau Alur Proses Formulir C1 Pemilu Serentak 2019*. <https://web.facebook.com/KPURepublikIndonesia/posts/mau-tau-alur-proses-formulir-c1-pemilu-serentak-2019-simak-infografis-berikut-in/1107454896091788/>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pada pukul 19.36 WIB.

⁹⁸ Narda Margaretha Sinambela. Antisipasi Kecurangan Pemilu dengan Situng, https://www.antarane.ws.com/berita/3554469/kpu-ri-antisipasi-kecurangan-pemilu-dengan-situng?utm_source. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pada pukul 20.45 WIB.

Di samping berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi Situng, tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai kelemahan yang memicu polemik di tengah masyarakat. Polemik proses rekapitulasi perolehan suara melalui Situng umumnya dipicu karena kesalahan teknis penyelenggara pemilu yang kurang detail, teliti, dan profesional. Implikasinya, terjadi inkonsistensi informasi yang ditampilkan di Situng antara input data jumlah perolehan suara di TPS dengan data hasil scan Form C1.⁹⁹

Kesalahan teknis input data di Situng dikarenakan oleh beberapa faktor:

Pertama, tidak semua tulisan tangan Form CI yang dibuat oleh panitia pelaksana pemilu di TPS (KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) jelas dan mudah dibaca. Hasilnya, ketika operator dan pegawai KPU Kabupaten/Kota melakukan *input* data sering terjadi kekeliruan. **Kedua**, petugas KPPS tidak mencantumkan jumlah angka perolehan di Form C1 dengan teliti dan detail. Misalnya, pada beberapa Form C1 ditemukan hanya terisi perolehan suara calon kandidat. Sementara kolom jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah terlewat untuk diisi. Hal ini berdampak pada kinerja operator dan pegawai KPU Kabupaten/Kota yang bertugas meng-*input* data melalui aplikasi Situng. Peraturan dan SOP yang ada hanya mewajibkan mereka untuk meng-*input* dan men-*scan* dokumen Form C1 apa adanya tanpa melakukan perubahan sedikit pun dengan alasan apa saja. Implikasinya, ketika terdapat dokumen C1 yang

⁹⁹ Hasan, M. "Pengawasan Pemilu...", hlm. 93.

tidak terisi lengkap menyebabkan *input* data di Situng tidak komprehensif. Misalnya, dokumen C1 yang hanya tertulis jumlah perolehan suara calon kandidat, maka yang terpublikasi di Situng hanya *input* data perolehan calon tanpa *input* jumlah suara sah keseluruhan calon. **Ketiga**, kesalahan teknis input data di Situng dikarenakan operator yang bertugas *input* data dokumen Form C1 ke aplikasi Situng kelelahan. Faktor kelelahan menyebabkan kinerja menurun dan sulit fokus. Apalagi, desain pemilu serentak 2019 sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu serentak 2019 menggabungkan lima jenis pemilihan sekaligus dalam satu waktu, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD RI, pemilihan DPRD Provinsi, dan pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Operator yang bertugas harus melakukan input data dan scan dokumen Form C1 kelima jenis pemilihan tersebut. Hal ini menyebabkan mereka kelelahan dan kehilangan konsentrasi sehingga menyebabkan kesalahan teknis input data ke Situng. **Keempat**, kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah. Proses rekapitulasi suara melalui Situng membutuhkan petugas yang sangat banyak, sementara jumlah pegawai KPU sangat terbatas. Untuk kepentingan ini, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen terbuka kepada masyarakat untuk bertugas melakukan input data dan scan dokumen Form C1 ke Situng. Rekrutmen tenaga kontrak baru memerlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis untuk menjamin kinerja petugas sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

Namun permasalahannya, pelatihan dan bimbingan teknis belum maksimal sehingga menyebabkan masih ditemukan kesalahan teknis. Selain itu, pada beberapa daerah, petugas kontrak memiliki kedekatan personal dengan pegawai KPU Kabupaten/Kota karena kekurangan tenaga kerja.¹⁰⁰

Salah satu contoh kesalahan teknis *input* dokumen Form C1 di aplikasi Situng. Terdapat inkonsistensi antara tampilan *scan* dokumen Form C1 dan tampilan *input* data pada penghitungan online. Dokumen Form C1 TPS Nomor 093, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta pada pemilihan presiden 2019 menunjukkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Amin sebanyak 47 suara. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno mendapat suara sebanyak 162. Tetapi, pada tampilan input data menunjukkan inkonsistensi. Pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Amin sebanyak 180 suara. Sementara, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno sebanyak 56 suara. Merespons kesalahan tersebut, pihak KPU sudah melakukan perbaikan data sehingga data yang dipublikasikan di Situng sesuai dengan perolehan suara pada dokumen Form C1.¹⁰¹

Kesalahan teknis input data pada aplikasi Situng ditemukan di berbagai TPS di beberapa daerah. Berdasarkan temuan Bawaslu, setidaknya

¹⁰⁰ International IDEA. "Rekapitulasi Digital: Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi Pemilu." *Laporan Tahunan Demokrasi Digital*. (Stockholm: International IDEA Press, 2021), hlm. 47-50.

¹⁰¹ Imam Hamdi. *Kisruh Input Form C1 TPS di Bidara Cina*. <https://www.tempo.co/arsip/kisruh-input-form-c1-tps-di-bidara-cina-ini-penjelasan-bawaslu-751396>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pada pukul 15.00 WIB.

terdapat 7.300 kesalahan input Situng yang dilakukan oleh KPU.¹⁰² Hal ini menyebabkan Bawaslu memutuskan bahwa KPU telah melanggar prosedur *input* hitung. Meskipun demikian, Bawaslu tetap meminta KPU untuk melanjutkan proses rekapitulasi suara melalui Situng dengan catatan memperbaiki kesalahan input. Menindaklanjuti putusan Bawaslu, KPU mengoreksi kesalahan input data dan menampilkan beberapa pernyataan yang dipublikasikan di situs web Situng sebagai bentuk *disclaimer*, yaitu (1) input data Situng sesuai apa adanya berdasarkan angka yang tertulis pada salinan Form C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS; (2) jika terdapat kesalahan pengisian data pada Form C1, dapat diperbaiki sesuai dengan rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan; (3) apabila terdapat inkonsistensi data input di Situng dengan *scan* salinan Form C1 dapat dikoreksi sesuai dengan yang tertulis dalam Salinan Form C1; dan (4) data yang ditampilkan dalam Situng bukan hasil resmi rekapitulasi suara. Penetapan hasil rekapitulasi yang sah dilakukan secara berjenjang.¹⁰³

Meskipun KPU telah melakukan koreksi terhadap kesalahan input data Situng dan melakukan *disclaimer*, persoalan tidak serta-merta terhenti. Berbagai kesalahan input data Situng yang

¹⁰² Raka Dwi Novianto. "Bawaslu Temukan 7.300 Kesalahan Input Situng." *SINDOnews*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1405299/12/bawaslu-temukan-7300-kesalahan-input-situng?>. Diakses pada tanggal 10 November 2024 pada pukul 13.25 WIB.

¹⁰³ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). *Situs Resmi Situng Pemilu 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. Diakses melalui <https://pemilu2019.kpu.go.id>. Pada tanggal 30 November 2024 pukul 14.05 WIB.

ditemukan di berbagai TPS di banyak daerah telah memicu keraguan publik terhadap hasil pemilu. Muncul asumsi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa KPU curang dan tidak netral. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan sebab kesalahan data input Situng akan memengaruhi psikologi pemilih yang mendukung calon kandidat dan merasa dirugikan dengan adanya kesalahan tersebut. Anggapan KPU melakukan kecurangan semakin menguat. Kepercayaan publik yang mulai goyah dipolitisasi oleh calon kandidat yang merasa kalah dalam kontestasi elektoral untuk mendelegitimasi hasil pemilu dengan dalih KPU tidak netral karena ditemukan banyak kesalahan. Implikasinya, masa rekapitulasi penghitungan suara semakin memanaskan tensi politik.¹⁰⁴

Pemilihan presiden tahun 2019 menjadi konteks untuk menjelaskan bagaimana politisasi terhadap kesalahan KPU dalam *input* Situng secara sengaja dilakukan untuk mempertajam *public distrust* yang berujung pada upaya mendeligitimasi hasil pemilu. Pemilihan presiden tahun 2019 adalah pengulangan pertarungan politik antara dua kekuatan, yaitu Jokowi dan Prabowo yang sebelumnya juga bersaing sengit dalam kontestasi elektoral pada pemilu 2014. Dua kekuatan ini menyebabkan publik terpolarisasi karena perbedaan dukungan. Polarisasi dukungan pemilih sangat

¹⁰⁴ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). *KPU Terbukti Langgar Prosedur Input Situng & Quick Count*. Jakarta, Mei 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190518144535-4-73393/kpu-terbukti-langgar-prosedur-input-situng-quick-count>. diakses pada tanggal 15 Desember 2024 pada pukul 20.34 WIB.

terasa di media sosial hingga muncul label “Cebong” (sebutan untuk pendukung Jokowi) dan “Kampret” (sebutan untuk pendukung Prabowo). Media sosial menjadi lahan subur untuk praktik ujaran kebencian, kampanye negatif, dan berbagai kabar bohong (*hoax*) selama pemilu, baik pada pemilu 2014 maupun 2019. Meskipun polarisasi dukungan pemilih yang kuat di media sosial tidak setajam dalam kehidupan nyata masyarakat, tetapi polarisasi politik di media sosial menjadi sangat sensitif dan berpotensi menyebabkan kekacauan politik. Kesalahan input Situng oleh KPU menyebabkan pemilih mempertanyakan kredibilitas hasil pemilu. Kondisi ini menjadi bola panas yang dipicu akibat rasa kekecewaan pendukung Prabowo-Sandiaga Uno yang diprediksi kalah apabila mengacu pada data hasil rekapitulasi suara sementara di Situng dan hasil berbagai lembaga survei yang melakukan hitung cepat (*Quick Count*).¹⁰⁵

Politisasi terhadap isu kesalahan input Situng dimainkan untuk membangun opini publik bahwa KPU berbuat curang dan tidak netral sehingga dapat mendelegitimasi hasil pemilu. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan eksistensi media sosial dengan menyebarkan informasi bohong (*hoax*) untuk memengaruhi opini publik. Implikasinya, pada masa-masa rekapitulasi perolehan suara, isu mengenai KPU curang dan tidak netral menghiasi perbincangan di media sosial. Hadirnya isu negatif yang dirancang secara sengaja untuk menyerang

¹⁰⁵ Nugroho, A., Wibowo, S. "Efek Polarisasi Politik di Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2014 dan 2019." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 11(2), Juli 2020, hlm. 99-112.

KPU terkonfirmasi sebagaimana hasil analisa dari *Big Data Analytics* milik Depertemen Politik Pemerintahan UGM yang melakukan pemetaan terhadap perbincangan isu negatif di Twitter selama pemilihan presiden tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan pada pra pemilu (12-16 April), hari pemilihan (17 April) dan pasca pemilihan (18-22 April). Hasil analisis memperlihatkan bahwa isu negatif lebih banyak ditemukan pada masa pasca pemilu dengan target terbesar adalah lembaga KPU dibandingkan terhadap pasangan calon. Dari tiga periode tahapan pengumpulan data, ditemukan bahwa pada masa pra pemilu dan hari pelaksanaan pemilu, isu negatif lebih banyak menyerang masing-masing pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Amin dan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Sandi. Namun ketika memasuki pasca pemilu, isu negatif lebih banyak menyerang lembaga KPU. Secara keseluruhan dari hasil analisa isu negatif adalah untuk pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin sebanyak 4.993 twit (32, 3%), pasangan calon Prabowo-Sandiaga Uno sebanyak 1.995 twit (12,9 %) dan KPU sebanyak 8.498 twit (54, 9%). Sedangkan frasa dan tagar yang muncul di twitter terkait KPU adalah bahwa KPU dianggap curang, tidak netral.¹⁰⁶

Hadirnya isu negatif terkait KPU yang menguat pasca hari pemilihan mempertegas bahwa terdapat upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal ini tidak lepas karena dipicu oleh adanya

¹⁰⁶ Gusti Grehenson. KPU Jadi Sasaran Isu Negatif di Medsos. <https://ugm.ac.id/id/berita/17884-kpu-jadi-sasaran-isu-negatif-di-medsos>. Diakses pada tanggal 13 November 2024 pukul 21.35 WIB.

kesalahan input dokumen C1 di Situng di berbagai TPS yang menyebabkan keraguan publik. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memolitisasi kesalahan input data agar terjadi krisis kepercayaan, khususnya tim pendukung pasangan calon Prabowo-Sandi yang selama proses rekapitulasi menunjukkan kekalahan. Misalnya, beberapa barisan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sering mengeluarkan pernyataan bernada provokasi ke publik seperti menuding KPU melakukan manipulasi Situng dan hanya menguntungkan pasangan Jokowi-Amin). Ironisnya, tuduhan-tuduhan dari BPN Prabowo-Sandi yang dilontarkan ke publik tidak pernah mengungkap data atau bukti dari tuduhan tersebut.¹⁰⁷

Hal ini menjadi realitas politik yang tidak dapat dinafikan bahwa pihak yang merasa kalah dalam kontestasi elektoral cenderung tidak akan puas dengan hasil pemilu dan menganggap bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak netral dan melakukan kecurangan. Berkaca pada pengalaman pemilu presiden di Indonesia, semua kubu yang kalah (Wiranto, Megawati, Jusuf Kalla) pernah menuding pemilu curang bahkan menjadi dasar melakukan gugatan sengketa hasil pemilu di MK meskipun sampai saat ini tidak pernah ada kasus gugatan yang berhasil dimenangkan. Hanya saja, dalam konteks Pilpres 2019 menjadi lebih rumit

¹⁰⁷ Fathiyah Wardah. *Bawa Bukti Salah Hitung, Relawan IT BPN Desak Bawaslu Stop Situng KPU*. Washington, D.C. <https://www.voaindonesia.com/a/bawa-bukti-salah-hitung-relawan-it-bpn-desak-bawaslu-stop-situng-kpu/4904315.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024 pada pukul 15.05 WIB.

karena tuduhan kecurangan pemilu mendapatkan momentum ketika terjadi kesalahan teknis input Situng yang dilakukan oleh petugas KPU.¹⁰⁸ Sebuah penelitian mengungkap bahwa apabila KPU lebih profesional dan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan teknis dalam proses rekapitulasi melalui Situng, sangat mungkin isu negatif yang menyerang KPU dapat diminimalisir karena tidak ada dasar yang jelas untuk menganggap bahwa KPU curang. Isu negatif yang menyerang KPU dan ketidakpastian proses rekapitulasi perolehan suara yang mengoyak kepercayaan publik memicu segregasi sosial yang berujung pada konflik dan kerusuhan sosial.¹⁰⁹

Salah satu dari kerusuhan yang terjadi yaitu, demonstrasi dan kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga Uno karena tidak menerima kekalahan dan tidak percaya dengan hasil pemilu dengan menuding bahwa KPU curang. Mobilisasi massa terus menguat seiring beredarnya isu negatif dan kabar bohong yang berseliweran di media sosial. Implikasinya, pada bulan Mei, ratusan ribu orang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pusat Bawaslu RI di Jakarta. Massa tidak puas dengan hasil sementara yang menunjukkan kemenangan Jokowi-Amin dan menganggap terdapat kecurangan dalam pemilu. Aksi unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan. Massa

¹⁰⁸ Mela Armani, *5 Fakta Salah "Entry" Data Penghitungan Suara Pemilu 2019*. (2019). *Kompas.com*. Diterbitkan pada 22 April 2019. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/22/18224351/5-fakta-salah-entry-data-penghitungan-suara-pemilu-2019?page=all>, diakses pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.03 WIB.

¹⁰⁹ Mahpudin. "Teknologi Pemilu...", hlm. 161.

melempar batu pada aparat keamanan yang bertugas dan merusak apa pun yang ada di sekeliling mereka. Kerusakan semakin tidak terbendung menjelang masa-masa pengumuman calon presiden dan wakil presiden. Kerusakan memuncak setelah KPU secara resmi mengumumkan kemenangan Jokowi-Amin melalui proses rekapitulasi suara secara manual. Dalam kerusakan ini, sedikitnya sebanyak enam orang meninggal dunia dan 200 orang mengalami luka-luka akibat terjadi baku hantam dengan aparat keamanan.¹¹⁰

Dengan kata lain, keberadaan isu negatif dan kabar bohong di media sosial berkontribusi dalam mempertajam keraguan publik terhadap hasil pemilu dan menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi massa yang berujung pada tindakan kerusakan. Era post truth yang ditandai dengan keadaan warga negara yang lebih memercayai sebuah informasi secara emosional menjadi mudah untuk dimobilisasi oleh elit politik. Massa pendukung Prabowo-Sandi cenderung memercayai informasi yang memuaskan pilihan politik mereka dan menolak informasi yang dianggap merugikan tanpa mempertimbangan kebenaran sebuah informasi secara rasional dan ilmiah. Akibatnya, isu negatif dan kabar bohong sangat berperan dalam membentuk opini publik termasuk membuat narasi bahwa KPU curang dan tidak netral. Kerusakan massa yang terjadi pada

¹¹⁰ Kristian Erdianto, *Demo Penolakan Hasil Pilpres Berujung Rusuh, Ini Komentar BPN Prabowo Sandiaga*, https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/14095491/demo-penolakan-hasil-pilpres-berujung-rusuh-ini-komentar-bpn-prabowo?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 19.15 WIB.

masa rekapitulasi suara dan menjelang pengumuman hasil pemilu menjadi bukti bagaimana *era post truth* tidak bisa dilepaskan dalam pelaksanaan demokrasi elektoral. Artinya, keberhasilan dan kegagalan penerapan teknologi pemilu dalam hal ini Situng tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi tetapi juga konteks sosial politik menjadi penting untuk diperhatikan.¹¹¹

3. Konsep Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024

Sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) sebagai bagian dari keterbukaan data pemilu. Berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.¹¹² Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) diperkenalkan sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu. Aplikasi Sirekap yang dapat diakses oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui android dan *website*, kemudian data akan langsung terkirim ke KPU. Aspek transparansi ini menjadikan

¹¹¹ Fenomena *Post-Truth* Sebagai Alat Gerakan Sosial Politik Pada Pemilihan Presiden 2019 (Studi Perubahan Sosial), *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, September 2023, 11(3), hlm. 304-311.

¹¹² Komisi Pemilihan Umum. *Panduan Penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024*. (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI, 2024), hlm 23-27.

alasan KPU menggunakan Sirekap dibanding Situng.¹¹³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 56 PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Sirekap merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi suara dalam pemilu, serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Sistem ini sebelumnya telah diterapkan dalam Pilkada 2020 dan akan digunakan kembali oleh KPU pada Pemilu 2024 dengan beberapa penyempurnaan.¹¹⁴

Dalam konteks status hukum Sirekap dalam UU Pemilu/Pilkada, dapat dinyatakan bahwa rekapitulasi elektronik hasil Pemilu masih belum mendapatkan pengaturan yang memadai dalam tingkatan peraturan UU, terutama UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang masih mengadopsi rekapitulasi berjenjang secara manual. Meskipun demikian, potensi untuk mengatur sistem elektronika digital sebenarnya telah terbuka, merujuk pada beberapa pasal tertentu dalam berbagai UU, seperti Pasal 85 Ayat (1) dan (2a) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 98 Ayat (3) UU No. 8 tahun 2015, serta Pasal 111 ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 tahun 2015. Kelima pasal tersebut memberikan dasar

¹¹³ Crysania Suranto, *Ini Perbedaan Situng, Aplikasi Sirekap, Sirekap Web*. <https://teknologi.bisnis.com/read/20240212/84/1740201/ini-perbedaan-situng-aplikasi-sirekap-dan-sirekap-web?>, diakses pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 18.37 WIB.

¹¹⁴ Mpesau, A. *Implementasi Sirekap dalam Pemilu 2024: Inovasi dan Tantangan*. (Yogyakarta: Penerbit Nusantara, 2024), hlm. 112-114.

hukum yang mencakup beberapa aspek, seperti memberikan opsi pemberian suara melalui peralatan Pemilihan Suara secara elektronik, menekankan bahwa pemberian suara elektroik harus mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat, serta memberikan keleluasaan dalam metode penghitungan suara, baik secara manual maupun elektronik. Selain itu, pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU yang ditetapkan setelah berkonsultasi dengan pemerintah.¹¹⁵

Adapun cara kerja Sirekap pada tahapan Pemilu/Pilkada, data yang telah dikirim dari tingkat TPS dan telah diperiksa akan direkam dalam Sirekap *Web* Kecamatan. Basis data ini akan diolah menjadi basis data yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk dipublikasikan. Basis data tersebut juga menjadi data awal untuk rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK. Setelah itu, data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan akan diagregasi dan digunakan sebagai data awal rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, data tersebut juga diagregasi untuk digunakan sebagai

¹¹⁵ Mpesau, R. *Analisis Hukum dan Implementasi SIREKAP dalam Pemilu di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Hukum dan Politik Indonesia Press, 2024), hlm. 45-49.

data awal rekapitulasi di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi.¹¹⁶

4. Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024

Penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024 membawa sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan secara serius. Meskipun menawarkan sejumlah manfaat dalam hal efisiensi dan akurasi, Sirekap juga dapat rentan terhadap masalah keamanan data, kurangnya transparansi, dan potensi ancaman terhadap integritas proses pemilu. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan Sirekap adalah masalah keamanan data suara. Dengan data suara yang disimpan dan diproses secara digital, ada risiko besar terhadap peretasan sistem atau manipulasi data yang dapat mengancam integritas hasil pemilu. Kecurangan seperti manipulasi suara atau penambahan suara palsu dapat terjadi jika sistem Sirekap tidak dilengkapi dengan protokol keamanan yang memadai. Selain itu, risiko kebocoran data pribadi pemilih juga perlu diperhatikan yang dapat mengancam privasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk memperkuat sistem keamanan terhadap akses ke sistem, dan pelatihan yang intensif bagi petugas

¹¹⁶ Saetrian, A. F., *et.al.* "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden", *Jurnal Demokrasi*, Juli 2024, 1(3), 225-233.

pemilu dalam mengelola dan melindungi data suara.¹¹⁷

Pada saat sengketa Pilpres 2024 sidang lanjutan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) Tahun 2024 pada Rabu (3/4/2024). Sidang gabungan perkara Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor: 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan seorang ahli yakni Marsudi Wahyu Kisworo yang merupakan Ahli di bidang IT, dan dua orang saksi yakni Yudistira Dwi Wardhana Asnar dan Andre Putra Hermawan. Marsudi dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo menyebutkan, sejak 2004 yang mana pertama kali teknologi computer digunakan dalam pemilu, sistem penghitungan suara digital selalu dipermasalahkan. Menurutnya terakhir tahun 2019 dan sekarang terulang lagi, padahal kita semua tahu bahwa kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan, suara yang sah itu adalah penghitungan suara berjenjang. Artinya, ekstrimnya seandainya Sirekap tidak ada pun sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap penghitungan suara.¹¹⁸

Professor pertama di bidang IT di Indonesia itu lebih lanjut menjelaskan, Sirekap terdapat dua jenis yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Data

¹¹⁷ Inzana, N., *et.al.* "Enhancing Cybersecurity in Electoral Systems: Lessons from Indonesia's SIREKAP." *Journal of Digital Electoral Studies*, 8(3), Maret 2024, hlm. 89-95.

¹¹⁸ Mahkamah Konstitusi RI, RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024, PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2024), hlm. 9.

masuk dalam sirekap web itu dari sirekap mobile, sirekap web tugasnya lebih kepada untuk melakukan konsolidasi, melakukan virtualisasi atau mengeksport data ke web dan kemudian dapat dilihat tampilannya di web. Terdapat tiga problem dalam sirekap mobile, problem pertama dari sirekap mobile yaitu mengambil data dari form C1 Hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang Namanya *Optical Character Recognition* (OCR).¹¹⁹

OCR ini adalah sebuah perkembangan kemajuan di banding situng yang mana angkanya dimasukan secara manual. Menurut Marsudi, hal tersebut dapat timbul kehebohan seolah-olah ada kesengajaan *entri* yang dinaikkan dan sebagainya. Jadi, tulisan yang ada di C1 Hasil itu di-*scan*, di-*capture*, kemudian diubah menjadi angka. Di sinilah problem pertamanya karena tulisan form C1 tulisan tangan dan tulisan tangan setiap orang itu berbeda. Apalagi tulisan itu di 822 (delapan ratus dua puluh dua) ribu TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulis tangannya berbeda. Mungkin di TPS ini tulisannya bagus mudah dibaca, dan mungkin juga ada Sebagian yang tulisannya jelek dan sulit dibaca. Bahkan *style* penulisan angka bisa berbeda-beda, contoh penulisan angka 4, ada yang menulisnya

¹¹⁹ Marsudi Wahyu Kisworo. "Perbedaan Sirekap Mobile dan Sirekap Web untuk Perhitungan Suara KPU." *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/pemilu/perbedaan-sirekap-mobile-dan-sirekap-web-untuk-perhitungan-suara-kpu-85610>, diakses pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 10.31 WIB.

seperti kursi terbalik, atasnya terbuka, ada yang atasnya tertutup.¹²⁰

OCR akurasiya masih 99% jadi masih ada kemungkinan 1% *error*, dan pada saat digunakan di lapangan itu bisa lebih rendah lagi, bisa menjadi 93%, sehingga ada kemungkinan ada 7% salah OCR merubah gambar menjadi angka. Problem kedua, dari sisi kamera Sirekap mobile di instal di masing-masing *handphone* (hp) KPPS. Seperti yang kita ketahui, merk hp berbeda-beda kualitasnya. Akibatnya terjadi perbedaan pada form C1. Ada yang jelas, ada yang remang-remang, ada yang warna putih dan ada juga yang kekuning-kuningan. Masalah ketiga, problem kertas. Ketika kertas terlipat bisa menimbulkan kesalahan interpretasi OCR. Menurut Marsudi karena OCR ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, dia hanya patuh kepada training data. Sistem AI seperti OCR ini pada awalnya diberikan data dari tulisan tangan kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari, dia bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Akan tetapi, jika kualitas gambarnya tidak jelas, maka akan menjadi masalah dan hasil yang ditampilkan menjadi tidak sesuai. Ketiga masalah ini menjadi faktor yang menjelaskan kenapa terjadi perbedaan hasil C1 dan hasil pemungutan suara yang ditampilkan di Sirekap.¹²¹

¹²⁰ Rijal. Terdapat Tiga Masalah Dalam Sirekap Mobile. <https://beritaup2date.com/pemilu/2024-04-04/terdapat-tiga-masalah-dalam-sirekap-mobile>. diakses pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 10.50 WIB.

¹²¹ Argawati, Utami. (2024). "Analisis Sistem OCR dalam Sirekap: Kendala dan Solusi." *Jurnal Teknologi Pemilu*, 5(3), tahun 2024, hlm. 124-128.

Sirekap merupakan bagian Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum. Tantangan yang didapatkan selama penyelenggaraan keterbukaan data pemilu oleh KPU oleh riset *The Indonesian Institute*, **pertama** adalah belum optimalnya implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di internal KPU, minimnya sosialisasi tentang pentingnya data pemilu terbuka, dan SPBE masih menjadi persoalan di internal KPU.¹²²

SPBE belum tersosialisasi dengan baik di daerah dan belum dijiwai oleh penyelenggara pemilu sendiri untuk menyelenggarakan data pemilu terbuka. Tantangan **kedua** adalah keterbatasan SDM. Keterbatasan tenaga pengelola data, karena kurang terampil juga menjadi persoalan. Selain itu, persoalan infrastruktur terkait perangkat komputer, jaringan internet, infrastruktur lainnya yang menunjang keterbukaan data pemilu Indonesia masih kurang. Kondisi ini banyak ditemui di daerah. Keterbukaan data pemilu sangat penting kedepannya untuk memperkuat integritas pemilu, memberikan harapan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemilu. Persoalan SDM harusnya bisa ditanggulangi jauh sebelum menjalankan Sirekap. Sosialisasi dan bimtek di KPPS masih minim hingga input Sirekap juga masih minim. KPU perlu memberikan pernyataan sikap dan menyampaikan secara terbuka tentang masalah yang ada, sehingga

¹²² The Indonesian Institute. *Keterbukaan Data Pemilu: Tantangan dan Solusi di Era Digital*, (Jakarta: The Indonesian Institute, 2023), hlm. 45-50.

tidak ada kecurigaan di masyarakat. Mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu, mendorong sosialisasi keterbukaan data pemilu di internal KPU, mendorong pemerataan internet di daerah oleh Kominfo, khususnya untuk persiapan pemilu serentak periode berikutnya.¹²³

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada aplikasi Sirekap dalam pemilu serentak pada tahun 2024, diantaranya yaitu:¹²⁴

- a. Jumlah suara tidak sesuai dengan jumlah DPT berdasarkan C1;
- b. Kesalahan input data oleh KPPS dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah suara dan jumlah DPT berdasarkan C1;
- c. Tidak adanya verifikasi data: pada beberapa TPS ditemui jumlah vote C 1 jauh melebihi jumlah DPT. Perbedaannya sangat signifikan mulai dari ribuan bahkan sampai ada yang jutaan pada satu TPS.
- d. Kurang optimalnya penggunaan teknologi OMR dan OCR;
- e. Tingkat Akurasi yang rendah: teknologi OCR dan OMR yang digunakan masih memiliki tingkat akurasi yang rendah, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pengenalan data.

¹²³ Arfianto Purbolaksono. *Melihat Penyelenggaraan Keterbukaan Data Pemilu Terbuka Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024*. (Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, 2022), hlm. 1-2.

¹²⁴ Rismel. Pengoperasian Aplikasi Sirekap Pemilu 2024, Kendala Yang Mungkin Muncul. *Kompasiana*, 5 Mei 2024. [https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3566-Pengoperasian-Aplikasi-SIREKAP-Pemilu-2024---Kendala-Yang-Mungkin-Muncul.-diakses pada tanggal 9 November 2024 pada pukul 09.14 WIB](https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3566-Pengoperasian-Aplikasi-SIREKAP-Pemilu-2024---Kendala-Yang-Mungkin-Muncul.-diakses%20pada%20tanggal%209%20November%202024%20pada%20pukul%2009.14%20WIB).

- f. Kualitas pada gambar: kualitas pada gambar yang diupload juga dapat menyebabkan kegagalan pengenalan data oleh teknologi OCR dan OMR.
- g. Penggunaan teknologi pada *client server*: proses identifikasi gambar menggunakan OCR dan OMR berlangsung pada *client server*, artinya identifikasi gambar tersebut diproses di masing-masing *gadget* petugas KPPS. Sehingga proses identifikasi tersebut sangat bergantung pada *hardware* yang ada di dalam *gadget* tersebut. Hal ini akan menyebabkan inkonsistensi pada proses identifikasi.

Adapun contoh permasalahan yang terjadi di salah satu TPS di Kabupaten Cianjur, pada form C1 Hasil suara yang diperoleh oleh DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sudah benar dan tidak melebihi apapun tapi setelah di input kedalam aplikasi Sirekap menjadi berubah. Di dalam aplikasi Sirekap kita bisa merubah nya sehingga bisa di sesuaikan dengan form C1 Hasil jika untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Akan tetapi, jika untuk perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden pada aplikasi Sirekap tidak bisa di ubah, C1 hasil sudah benar setelah di input kedalam aplikasi Sirekap hasil suara berubah drastis, contoh dari yang awalnya 100 menjadi 200 dan suara tersebut tidak bisa dirubah seperti suara yang didapat oleh DPR/DPD.¹²⁵

¹²⁵ Yuliana. KPU Sebut Kesalahan Input Data di Sirekap karena KPPS Tak Bisa Koreksi Data Pilpres Jika Salah. (2024, Februari 20). *Tribun News*. Diakses dari <https://video.tribunnews.com/view/702456/kpu-sebut-kesalahan-input-data-di-sirekap-karena-kpps-tak-bisa-koreksi-data-pilpres-jika-salah?> Diakses pada tanggal 10 November 2024 pada pukul 9.30 WIB.

Contoh lain dari bukti kesalahan input data suara pada sirekap adalah di TPS 14 Kemiling Raya, Bandar Lampung. Terdapat penggelembungan suara untuk pasangan capres dan cawapres 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang diunggah oleh akun X @herricahyadi, dia menjelaskan bahwa di TPS tersebut terdapat 239 perolehan suara tiga Paslon. Paslon 01 Anies-Muhaimin meraih 52 Suara, Paslon 02 meraih 177 suara, dan Paslon 03 meraih 10 suara. Tetapi, setelah perolehan suara diunggah pada Sirekap, perolehan suara Paslon 02 berubah menjadi 677 suara. Contoh lainnya yaitu pada TPS 02 Mekar Jaya, Kerinci, yang mana pada C1-hasil, itu perolehan suara oleh paslon 01 sebanyak 18 suara, paslon 02 sebanyak 187 suara, dan sedangkan paslon 03 sebanyak 37 suara. Setelah di input pada sirekap web, jumlah suara 02 berubah menjadi 776, dengan keseluruhan jumlah hak pilih pada tps tersebut sebanyak 245 orang.¹²⁶ Dan masih banyak lagi kasus-kasus kesalahan input data suara pemilu lainnya yang terjadi pada pemilu 2024.

Aplikasi Sirekap secara kompleksitas bukan sebuah aplikasi yang rumit. Namun, uji coba Sirekap tahun 2020 dinyatakan gagal, dan pada pemilu serentak tahun 2024 ini pun tetap dikategorikan belum sepenuhnya berhasil. Sebagian besar masalah menurut KPU paling utama ada di SDM. Tapi ini penting sebagai langkah awal transparansi. KPU mengakui ada koreksi dari 150 ribu TPS atau 20%

¹²⁶ Haekal Attar. KPU Laporkan 1.223 TPS Salah Input di Sirekap" yang diterbitkan oleh NU Online. <https://nu.or.id/nasional/kpu-laporkan-1-223-tps-salah-input-di-sirekap-rFbHP?>. Diakses pada tanggal 9 November 2024 pada pukul 08.47 WIB.

dari total TPS. Hal ini berkaitan dengan masalah teknis, seperti gambarnya buram, salah halaman yang disebabkan oleh kurangnya bimtek. serta ketidakjelasan algoritma yang digunakan dalam *software*-nya. Jika pada pemilu selanjutnya Sirekap masih belum di perbaiki dan dioptimalkan, maka akan terus ada kecurigaan dari masyarakat yang menimbulkan konflik.¹²⁷

Oleh karena itu, sangat penting bagi KPU untuk menjelaskan SOP (Standar Operasional) Sirekap dengan baik, agar kekeliruan di lapangan bisa diminimalisir dan tidak ada konspirasi terkait upaya kecurangan. Pada saat ini KPU belum cukup bijak untuk menenangkan publik dan memberikan langkah perubahan serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan kembali. Pemilu 2024 tidak hanya terkait persoalan menghitung suara dan rekapitulasi, tapi ada proses sebelum Pemilu yang banyak orang menganggapnya memiliki kecacatan.¹²⁸

Banyaknya kesalahan input data suara pada sirekap mempengaruhi pandangan publik terhadap tingkat keakurasian dan transparansi sirekap dalam proses perolehan suara pemilu, aplikasi sirekap yang diharapkan dapat lebih baik dari pada aplikasi sebelumnya yaitu situng, ternyata belum mampu mencapai tujuan sepenuhnya, bahkan pada pemilu

¹²⁷ Arfianto, R. "Optimalisasi Keterbukaan Data Pemilu: Evaluasi SIREKAP dan Infrastruktur Pemilu di Indonesia." *Jurnal Politik dan Demokrasi*, 12(1), Januari 2024, hlm 21-25.

¹²⁸ Arus, L. "Formappi Duga KPU Ketipu oleh Tim IT Seolah Sirekap Aplikasi Luar Biasa." *Merdeka.com*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/formappi-duga-kpu-ketipu-oleh-tim-it-seolah-sirekap-aplikasi-luar-biasa-95286-mvk.html?> Diakses pada tanggal 10 November 2024 pada pukul 08.41 WIB.

ini konflik dalam masyarakat yang timbul akibat terdapat kesalahan input data pada sirekap lebih banyak dibandingkan dengan situng.¹²⁹

Terdapat beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada Sirekap yaitu :¹³⁰

- a. KPPS perlu dibelaki peningkatan pelatihan yang memadai untuk memastikan ketetapan input data.
- b. Penerapan sistem verifikasi data, sistem verifikasi data perlu diterapkannya vote tidak melebihi jumlah DPT, jika melebihi maka data tidak valid atau tidak bisa di input.
- c. Peningkatan kualitas teknologi OCR dan OMR: KPU perlu berinvestasi dalam teknologi OCR dan OMR yang lebih canggih tingkat akurasi yang tinggi.
- d. Peningkatan kualitas gambar formulir C1: KPPS perlu memastikan kualitas gambar formulir C1 yang baik untuk memaksimalkan pengenalan data oleh teknologi OCR dan OMR.
- e. Menerapkan OCR dan OMR pada *server-side*: KPU seharusnya memindahkan proses identifikasi gambar akan berlangsung di sisi server, artinya proses identifikasi gambar akan berlangsung di sisi server, sehingga tidak lagi bergantung pada hardware petugas KPPS dan

¹²⁹ Pratama, R. "Evaluasi dan Dampak Kesalahan Input Data pada Sistem Sirekap dalam Pemilu 2024." *Jurnal Teknologi Pemilu*, 12(3), hlm. 58-60.

¹³⁰ Rismel. Pengoperasian Aplikasi Sirekap Pemilu 2024, Kendala Yang Mungkin Muncul. *Kompasiana*, 5 Mei 2024. <https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3566-Pengoperasian-Aplikasi-SIREKAP-Pemilu-2024---Kendala-Yang-Mungkin-Muncul->. Diakses pada tanggal 9 November 2024 pada pukul 09.14 WIB.

menjaga konsistensi data karena seluruh gambar akan diproses pada server yang memiliki spesifikasi sama, walaupun hal ini akan membebani server dan butuh biaya lebih besar.

B. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 Dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 Dalam Mendukung Transparansi, Akurasi, Dan Efisiensi Pemilu Di Indonesia

Tabel 3.1

Aspek	SITUNG (Pemilu 2019)	SIREKAP (Pemilu 2024)
Keakuratan	Cenderung akurat karena berbasis entri data dari formulir C1 hasil scan. Namun, terdapat kesalahan entri dan selisih angka kecil di beberapa TPS.	Menggunakan teknologi OCR untuk membaca hasil foto C plano, tetapi banyak ditemukan kesalahan pembacaan dan perubahan data yang signifikan, terutama di tahap awal pemilu.
Transparansi	Relatif transparan; data C1 dapat diakses publik secara daring melalui situs KPU, meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum.	Juga terbuka untuk publik, tetapi seringkali menimbulkan kebingungan karena sistem sering berubah dan tidak disertai penjelasan yang memadai.

Aspek	SITUNG (Pemilu 2019)	SIREKAP (Pemilu 2024)
Efisiensi dan Efektivitas	Cukup efektif dalam publikasi hasil cepat; tetapi masih membutuhkan input manual oleh petugas sehingga rentan human error dan lebih lambat dari sistem otomatis.	Lebih cepat karena otomatisasi input dari hasil foto, tetapi kendala teknis menyebabkan efektivitas tidak tercapai secara optimal. Banyak daerah mengalami keterlambatan input.
Pengaruh terhadap Tata Kelola Administrasi Pemilu	Memberikan kemudahan dalam monitoring hasil pemilu, namun karena sifatnya bukan penentu hasil resmi, pengaruhnya terbatas pada aspek kontrol publik.	Dirancang sebagai alat bantu utama rekapitulasi, sehingga lebih berpengaruh terhadap struktur administrasi pemilu. Namun, sistem ini belum stabil sehingga menimbulkan beban baru pada penyelenggara.

Sumber: (Hardiyanti, R., et al. *Analisis Efektivitas Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dan Sirekap dalam Pemilu Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Media Press, Februari 2024, hlm. 22-26)

Situng dan Sirekap memiliki semangat dan niat baik untuk mewujudkan pemilu yang transparan, efisien, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, keduanya masih menyisakan banyak persoalan teknis dan

kepercayaan publik. Perlu peningkatan kualitas teknologi, pelatihan SDM, penguatan keamanan data, serta edukasi publik agar sistem penghitungan suara berbasis digital benar-benar memberi kemaslahatan sesuai prinsip *siyasaḥ idariyah* dalam Islam.

1. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019

- a. **Transparansi:** Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) memberikan transparansi melalui tampilan hasil penghitungan suara secara *real-time* yang dapat diakses publik di laman resmi KPU. Data yang disajikan berupa *scan* asli formulir C1, sehingga masyarakat bisa membandingkan hasil rekap secara langsung dari TPS. Namun, meski bersifat terbuka, tidak ada penjelasan detail kepada publik mengenai bagaimana data diolah dan bagaimana koreksi dilakukan terhadap kesalahan input. Hal ini menyebabkan kecurigaan publik terhadap potensi manipulasi data. Akibatnya, walaupun transparan dalam tampilan, substansi transparansi menjadi lemah karena tidak diimbangi dengan keterbukaan proses.¹³¹
- b. **Akurasi:** Akurasi Situng sangat dipengaruhi oleh kualitas input manusia (operator). Banyak kasus ditemukan berupa salah input angka dan keterbatasan pelatihan teknis kepada petugas KPPS. Meskipun data berasal dari *scan* formulir C1 asli, namun kesalahan input membuat data

¹³¹ Lembaga Survei Indonesia (LSI). *Transparansi dan Partisipasi dalam Pemilu 2019*, (Jakarta: LSI, 2019), hlm. 45.

tidak akurat dan menciptakan perbedaan dengan rekap manual. Akibatnya, publik sulit mempercayai hasil yang ditampilkan secara digital.¹³²

- c. Efisiensi: Secara konsep, Situng mempercepat proses publikasi hasil dibandingkan penghitungan manual. Namun dalam pelaksanaannya, banyak daerah menghadapi kendala akses internet, *server* lambat, dan penggunaan aplikasi yang belum optimal. Bahkan di beberapa daerah, rekap manual selesai lebih dulu dibanding input ke Situng.¹³³
- d. Efektivitas: Efektif sebagai alat bantu publikasi hasil awal pemilu. Masyarakat dapat memantau data real-time dan peserta pemilu bisa menggunakannya sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun karena banyaknya kekeliruan, publik tetap menunggu hasil rekap manual yang lebih bisa dipercaya.¹³⁴

2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024

- a. Transparansi: Sirekap memberikan transparansi lebih lanjut karena datanya langsung berasal dari tingkat TPS melalui aplikasi berbasis mobile. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk numerik dan grafik, yang memudahkan publik untuk melihat

¹³² Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). *Laporan Akhir Pengawas Pemilu 2019*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), hlm. 32.

¹³³ Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Hasil Ppemilu 2019*, (Jakarta: KPU, 2019), hlm. 78.

¹³⁴ Wahyuni, R. "Evaluasi Implementasi Situng Pemilu 2019." *Jurnal Administrasi Publik dan Teknologi*, Vol. 11, No. 4, tahun 2020, hlm, 102-104.

tren perolehan suara. Namun sayangnya, minimnya sosialisasi dari KPU menyebabkan banyak masyarakat tidak tahu bahwa data yang tampil adalah sementara dan belum final. KPU juga lambat merespons berbagai isu krusial, seperti anomali data, sehingga menimbulkan kegaduhan publik.¹³⁵ Dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemilu dan mengawasi jalannya pemilu dengan lebih baik.

- b. Akurasi: Meskipun Sirekap menggunakan teknologi OCR (*Optical Character Recognition*) dan OMR (*Optical Mark Recognition*) yang otomatis membaca tulisan dari foto C1, namun ternyata teknologi ini belum akurat. Banyak hasil scan tidak terbaca dengan benar atau menghasilkan angka yang sangat berbeda dari kenyataan. Akibatnya, hasil penghitungan di aplikasi Sirekap tidak sinkron dengan formulir manual C1.¹³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat mengurangi kesalahan, pengawasan manusia tetap penting untuk memastikan integritas data.
- c. Efisiensi: Sirekap berbasis *mobile app* yang memungkinkan KPPS menginput data dari TPS secara langsung, sehingga proses rekap yang panjang dan bertingkat dapat dipersingkat.

¹³⁵ KPU RI. *Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) dalam Pemilu 2024*, (Jakarta: KPU, 2024), hlm. 124.

¹³⁶ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). *Laporan Akhir Pengawas Pemilu 2024*, (Jakarta: Bawaslu, 2024), hlm. 20.

Namun, kebergantungan pada jaringan internet tinggi, dan saat *server overload*, banyak KPPS tidak bisa mengakses aplikasi saat hari pemungutan suara. Akhirnya data dikirim melalui Google Drive secara manual.¹³⁷ Dengan pengumuman hasil yang lebih cepat, masyarakat dapat segera mengetahui hasil pemilu dan mengurangi ketidakpastian yang sering terjadi setelah pemungutan suara.

- d. Efektivitas: sebagai alat bantu publikasi awal sangat tinggi jika sistem berjalan baik. Namun, kegagalan teknis, anomali data, serta kurangnya edukasi publik membuat Sirekap justru menjadi sumber kegaduhan politik. Bahkan, KPU sempat menutup tampilan data publik sementara karena verifikasi tertunda akibat *overload* sistem.¹³⁸

3. Perbandingan Hasil Penghitungan Manual Berjenjang, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 Dalam Pemilu Di Indonesia

a. Manual Berjenjang dan Situng 2019

Tabel 3.2

Metode Penghitungan	Joko Widodo- Ma'ruf Amin	Prabowo Subianto- Sandiaga Uno	Total Suara Sah
Rekapitulasi Manual	85.607.362 (55,50%)	68.650.239 (44,50%)	154.257.601
SITUNG	68.012.184	52.810.224	120.822.408

¹³⁷ KPU RI. *Sistem Informasi...*, hlm. 127.

¹³⁸ KPU RI. *Sistem Informasi...*, hlm. 130-132.

Metode Penghitungan	Joko Widodo- Ma'ruf Amin	Prabowo Subianto- Sandiaga Uno	Total Suara Sah
(78,91% data masuk)	(56,29%)	(43,71%)	

Sumber: (Badan Pusat Statistik. *Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi Tahun 2004, 2009, 2014, 2019, 2024* Jakarta: BPS, Februari 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU3NCMx/hasil-perhitungan-suara-sah-pemilu-presiden-dan-wakil-presiden-menurut-provinsi-tahun-2004---2009---2014--2019--2024.html>)

b. Manual Berjenjang dan Sirekap 2024

Tabel 3.3

Metode Penghitungan	Prabowo- Gibran	Anies- Muhaimin	Ganjar- Mahfud	Total Suara Sah
Rekapitulasi Manual	96.214.691 (58,59%)	40.971.906 (24,96%)	27.040.878 (16,45%)	164.227.475
SIREKAP (78,09% data masuk)	75.367.966 (58,83%)	31.378.224 (24,49%)	21.375.876 (16,68%)	128.122.066

Sumber: (Badan Pusat Statistik. *Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi Tahun 2004, 2009, 2014, 2019, 2024* Jakarta: BPS, Februari 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU3NCMx/hasil-perhitungan-suara-sah>)

pemilu-presiden-dan-wakil-presiden-menurut-provinsi-tahun-2004---2009---2014--2019--2024.html)

Pada Pemilu 2019, hasil Situng menunjukkan angka yang mendekati hasil rekapitulasi manual resmi KPU, dengan selisih persentase yang kecil.¹³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Situng dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam publikasi hasil penghitungan suara. Pada Pemilu 2024, meskipun Sirekap menunjukkan hasil sementara, terdapat laporan mengenai perubahan data yang signifikan setelah penetapan hasil oleh KPU. Misalnya, terdapat lebih dari 753 kali perubahan data dalam Sirekap setelah KPU menetapkan hasil pemilu, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keandalan sistem ini.¹⁴⁰

Perbandingan antara hasil penghitungan suara manual berjenjang, Situng, dan Sirekap menunjukkan bahwa sistem digital dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam publikasi hasil pemilu. Namun, keandalan dan integritas data dalam sistem digital seperti Sirekap perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Data yang digunakan dalam Situng 2019 dan Sirekap 2024 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi publik tentang transparansi

¹³⁹ Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI, Oktober 2019, hlm. 45.

¹⁴⁰ Ade Rosman. *PDIP Temukan KPU Ubah Data Sirekap 753 Kali Usai Rekapitulasi Tuntas*, Katadata.co.id, Jakarta, 22 Maret 2024, diakses pada <https://katadata.co.id/berita/nasional/65fd1fba42759/pdip-temukan-kpu-ubah-data-sirekap-753-kali-usai-rekapitulasi-tuntas>, pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 07.14 WIB.

pemilu. Situng, yang berbasis unggahan manual formulir C1 dalam bentuk gambar, memungkinkan masyarakat mengakses informasi hasil pemilu secara cepat. Namun, adanya kesalahan input data, keterlambatan unggahan, serta perbedaan dengan hasil rekapitulasi manual menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap akurasi sistem ini. Banyak masyarakat yang menganggap Situng tidak sepenuhnya transparan karena hanya menjadi alat bantu publikasi, bukan sistem rekapitulasi resmi.¹⁴² Sebaliknya, Sirekap diperkenalkan sebagai sistem yang lebih efisien dan akurat dengan teknologi *optical character recognition* (OCR) untuk membaca formulir C1 secara otomatis. Namun, dalam Pemilu 2024, berbagai anomali data, seperti perbedaan signifikan antara hasil pada formulir C1 dengan angka yang terbaca dalam sistem, justru memicu persepsi negatif di masyarakat. Kesalahan konversi angka yang menyebabkan perubahan jumlah suara menimbulkan kecurigaan akan kemungkinan manipulasi sistem. Selain itu, kendala teknis seperti server down dan akses yang sulit bagi petugas KPPS semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap transparansi KPU.¹⁴³

Kritik terhadap Sirekap banyak muncul di media sosial, dengan 85% sentimen negatif terhadap sistem ini dalam 105 ribu cuitan di Twitter/X. Hal ini menunjukkan bahwa publik menilai Sirekap belum

¹⁴² Wati, *Problematika Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024*, Yogyakarta, 2024, hlm. 4

¹⁴³ Kristianus Jimy Pratama. *Penguatan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum: Tantangan Regulasi dan Tata Kelola*. (Yogyakarta: Majalah Hukum Nasional, 2023), hlm. 7.

berhasil menghadirkan transparansi yang diharapkan. Oleh karena itu, meskipun tujuan awal Situng dan Sirekap adalah meningkatkan transparansi, berbagai kelemahan teknis dan operasional yang terjadi justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.¹⁴⁴

C. Analisis Perspektif *Siyasah Idariyah* Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 Dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024 Dalam Pemilu Di Indonesia, Terutama Dalam Menjaga Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Islam

1. Analisis Perspektif *Siyasah Idariyah* Terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) 2019 Dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) 2024

Dalam konteks pemilu, penggunaan sistem informasi seperti Situng (2019) dan Sirekap (2024) dapat dikategorikan sebagai bagian dari *ijtihad siyasah idariyah* oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu.

Kebijakan tersebut bertujuan:

- a. Menjamin transparansi hasil pemilu secara *real-time*.
- b. Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam penghitungan suara.

¹⁴⁴ Ajid Fuad Muzaki. *Evaluasi dan Rekomendasi Sirekap untuk Pilkada 2024*. https://rumahpemilu.org/evaluasi-dan-rekomendasi-sirekap-untuk-pilkada-2024/?utm_source=, diakses pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 15.37 WIB.

c. Memperkuat partisipasi publik melalui akses langsung terhadap data suara.¹⁴⁵

Namun, dalam penerapannya, kedua sistem menghadapi tantangan:

- a. Situng 2019: mengalami masalah seperti keterlambatan input data, *server error*, dan kesalahan entri data.
- b. Sirekap 2024: menghadapi tantangan validitas data (anomali), masalah OCR/OMR, dan kendala infrastruktur internet di daerah.

Dalam perspektif *siyasa idariyah*, semua kebijakan administratif seperti itu harus terus dievaluasi, diperbaiki, dan disempurnakan agar tidak menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) seperti:

- a. Ketidakpercayaan publik (*public distrust*)
- b. Kekacauan hasil pemilu
- c. Manipulasi data suara

2. Penilaian Situng dan Sirekap Berdasarkan Maqashid Siyasa Idariyah

Untuk mengetahui apakah suatu sistem seperti Situng dan Sirekap sesuai dengan *siyasa idariyah*, maka perlu dilakukan penilaian dengan tolok ukur sebagai berikut:

Tabel 3.4

Kriteria	Situng 2019	Sirekap 2024
Masalah	Meningkatkan transparansi, tetapi terlambat dan	Memberi kecepatan akses data suara,

¹⁴⁵ International IDEA. *Pemilu di Era Digital: Panduan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik*. Jakarta: International IDEA Indonesia, Maret 2022, hlm. 45–47.

Kriteria	Situng 2019	Sirekap 2024
	tidak akurat	namun terjadi anomali
Amanah	Terjadi kesalahan input dan inkonsistensi data	Sistem mengalami error pada hari pemungutan suara
Keadilan	Tidak semua TPS terekam optimal	Perbedaan data scan dan formulir C-1 sangat mencolok
Transparansi	Tersedia online tapi banyak kritik public	Diakses publik tapi penuh sentimen negative

Sumber: (Pradesa, R.A.. *Analisis Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam Pemilu 2019 dan 2024: Tinjauan Efektivitas dan Masalah Mursalah*. Jakarta: LIPI Press, Februari 2024. hlm. 45-47)

Sistem administrasi pemilu berbasis teknologi seperti Situng (2019) dan Sirekap (2024) dapat dianalisis dari kaca mata *siyasah idariyah*, khususnya dalam lima prinsip dasar: *masalah*, *amanah*, 'adalah (keadilan), efisiensi, dan partisipasi publik:

a. **Prinsip Masalah (Kemaslahatan Umat)**

Maslahah menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pemerintahan Islam. Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada terjaganya lima pokok

utama (*al-kulliyat al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴⁶

1) Situng 2019:

Situng digunakan KPU sebagai sistem transparansi publik terhadap hasil perhitungan suara di tingkat nasional. Meskipun bukan alat resmi rekapitulasi, data dari formulir C1 diunggah dan ditampilkan ke publik melalui laman resmi *pemilu2019.kpu.go.id*, memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi proses pemilu

- a) Manfaat *masalah*: Transparansi proses demokrasi, partisipasi masyarakat, serta akses data *real time*.
- b) Potensi *mudarat*: Ketika ada kesalahan input atau *server error*, kepercayaan publik bisa menurun.

2) Sirekap 2024:

Berbeda dari Situng, Sirekap ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 sebagai alat bantu rekapitulasi resmi. KPPS memfoto formulir C1 Plano menggunakan aplikasi dan hasilnya diunggah langsung ke pusat. Menurut laporan Bawaslu, penggunaan Sirekap menjangkau lebih dari 80% TPS di

¹⁴⁶ al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, Februari, hlm. 174.

Indonesia dengan waktu unggah hasil lebih cepat dibanding proses manual.¹⁴⁷

a) Manfaat *masalah*: Otomatisasi, percepatan, dan transparansi berbasis bukti digital.

b) Potensi *mudarat*: Masih ditemui ketidaksesuaian data OCR (pembacaan hasil gambar) dengan isi formulir, khususnya di daerah dengan sinyal lemah.

Baik Situng maupun Sirekap mengandung potensi masalah besar dalam konteks *siyash idariyah*. Namun keduanya harus dilengkapi dengan sistem koreksi manual dan pengawasan berlapis agar tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) berupa manipulasi digital atau kebingungan publik.

b. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Dalam Islam, jabatan publik adalah amanah yang harus dijaga. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 58 menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....”¹⁴⁸

Situng dan Sirekap memerlukan operator, pengawas, dan petugas yang jujur,

¹⁴⁷ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Laporan Pengawasan Pemilu 2024: Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemilu Serentak*. Jakarta: Bawaslu RI, Maret 2024, hlm. 57.

¹⁴⁸ Q.S. An-Nisa’ surah ke 4 ayat 58.

profesional, dan terlatih. Namun pada kenyataan dilapangan, masih terdapat banyak kasus kesalahan dalam proses input data pada aplikasi situng maupun sirekap.



- 1) Kasus Situng 2019: Berdasarkan temuan Bawaslu dan masyarakat sipil, terdapat lebih dari 7.300 kesalahan input data ke dalam sistem Situng.¹⁴⁹ Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan pelatihan petugas, yang secara *siyasa idariyah* mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip amanah.
- 2) Kasus Sirekap 2024: Komnas HAM mencatat dalam Laporan Pemantauan Pemilu 2024 bahwa keterbatasan sinyal dan pemahaman KPPS terhadap aplikasi menyebabkan sekitar 150 ribu data Sirekap tidak sinkron dengan data plano.¹⁵⁰ Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa pemegang amanah teknologi harus benar-benar memahami tugasnya agar data yang disampaikan kepada rakyat dapat dipercaya.

c. Prinsip Keadilan (*'Adalah*)

Keadilan dalam *siyasa idariyah* menuntut agar setiap warga negara mendapat hak politik yang sama, termasuk jaminan bahwa suaranya dicatat dan dihitung secara jujur. Jika sistem digital malah menimbulkan diskriminasi wilayah (karena sinyal, perangkat, atau SDM), maka keadilan menjadi bias.

¹⁴⁹ Perludem. *Laporan Pemantauan Pemilu 2019: Evaluasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng)*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Juli 2019, hlm. 18.

¹⁵⁰ Tanthowi, P. U. *Komnas HAM Sebut KPU Gagal Buat Inovasi untuk Kurangi Beban Kerja KPPS*. Media Indonesia. 2024, hlm. 1–2.

- 1) Situng 2019 banyak dikritik karena adanya kesalahan upload dan *input* data di beberapa daerah, yang menimbulkan kesan kecurangan. Padahal sistem itu hanya alat bantu dan bukan data resmi. Namun dalam perspektif *siyasa idariyah*, persepsi keadilan publik tetap harus dijaga.
- 2) Sirekap 2024 memiliki fitur koreksi manual dan sinkronisasi, tapi tetap ada laporan dari Papua dan Maluku yang mengalami *blank* sistem. Ini berarti ada ketimpangan infrastruktur yang berdampak pada keadilan politik.

d. Prinsip Efisiensi dan Profesionalisme Administrasi

Efisiensi adalah bagian dari *maqashid siyasa idariyah*. Dalam QS. An-Nisa: 29 disebutkan larangan memboroskan harta secara batil, yang dalam konteks administrasi dapat dipahami sebagai larangan proses lambat, boros, dan tidak profesional.¹⁵¹

- 1) Situng 2019: Sebagai alat bantu informasi, cukup efisien untuk publikasi hasil cepat, tetapi hanya informatif, bukan legal.
- 2) Sirekap 2024: Lebih efisien karena menyederhanakan tahapan rekapitulasi. Data dari TPS langsung masuk ke pusat. Namun jika tidak didukung pelatihan yang kuat, efisiensi berubah menjadi disinformasi.

¹⁵¹ Q.S.An-Nisa' surah ke 4 ayat 29.

e. Prinsip Partisipasi dan Transparansi

Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah prinsip penting dalam siyasah idariyah. Rasulullah SAW sendiri membiasakan musyawarah dan konsultasi publik dalam pengambilan keputusan.¹⁵²

Situng dan Sirekap memungkinkan:

- 1) Masyarakat melihat hasil suara secara online.
- 2) Pengawasan dari saksi dan pengamat dilakukan *real time*.
- 3) Lembaga pengawas seperti Bawaslu bisa mengakses data digital untuk audit dan verifikasi.

Namun, ini hanya efektif jika sistem tersebut:

- 1) Terbuka untuk dikoreksi.
- 2) Terlindungi dari manipulasi internal.
- 3) Dapat diakses merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Urgensi Evaluasi Siyasah Idariyah dalam Reformasi Sistem Pemilu

Berdasarkan realitas tersebut, siyasah idariyah menuntut pemerintah untuk:

- a. Mengutamakan pelatihan SDM teknis secara menyeluruh.
- b. Menjamin pengamanan data dari manipulasi dan kebocoran.
- c. Menerapkan verifikasi berlapis terhadap hasil input.

¹⁵² Q.S. Asy-Syura surah ke 42 ayat 38.

- d. Menyediakan saluran aduan dan evaluasi dari publik.
- e. Bersikap responsif terhadap masukan rakyat, sesuai prinsip *shura* dan *hisbah*.

Dengan demikian, meskipun kedua sistem dimaksudkan untuk mendatangkan *masalahah*, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *siyasa idariyah* karena masih menyisakan berbagai bentuk *mafsadat* administratif dan sosial.

